PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN KONSUMSI PERKAPITA TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU SUMATERA PERIODE TAHUN 2015-2020

(Skripsi)

Oleh

IMAM WIBOWO

(1611021095)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN KONSUMSI PERKAPITA TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU SUMATERA PERIODE TAHUN 2015-2020

Oleh

IMAM WIBOWO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel yang dapat mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera. Pada tahun 2020 Pemerintah mengubah ketentuan pengupahan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai UMP menurut UU Cipta Kerja yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Konsumsi Perkapita (Korida & Muhsin, 2021). Penelitian ini menggunakan motode Analisis data panel menggunakan *Random Effect Model* (REM). Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) tahun 2015-2020 dan mengunakan data *cross section* 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Hasil penelitian ini menunjukan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Konsumsi Perkapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020, sedangkan variabel Inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020.

Kata Kunci: Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Konsumsi Perkapita

ABSTRACT

THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, INFLATION AND PER CAPITA CONSUMPTION ON PROVINCIAL MINIMUM WAGES IN SUMATRA ISLAND FOR 2015-2020 PERIOD

By

IMAM WIBOWO

This study aims to determine the effect of variables that can affect the Provincial Minimum Wage on the island of Sumatra. In 2020 the Government changed the wage provisions in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. Several factors that can affect the UMP value according to the Job Creation Law are Economic Growth, Inflation and Per capita Consumption (Korida & Muhsin, 2021). This research uses panel data analysis method using Random Effect Model (REM). This study uses secondary data (time series) for 2015-2020 and uses cross section data from 10 provinces on the island of Sumatra.

The results of this study show that the variables of Economic Growth and Per capita Consumption have a significant and positive effect on the Provincial Minimum Wage on Sumatra Island for the 2015-2020 period, while the inflation variable has a significant and negative effect on the Provincial Minimum Wage on Sumatra Island for the 2015-2020 period.

Keywords: Provincial Minimum Wage, Economic Growth, Inflation and Per capita Consumptio

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN KONSUMSI PERKAPITA TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU SUMATERA PERIODE TAHUN 2015-2020

Oleh

IMAM WIBOWO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi	: **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN KONSUMSI PERKAPITA TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI DI PULAU SUMATERA PERIODE TAHUN 2015-2020**
Nama Mahasiswa	: **Imam Wibowo**
Nomor Induk Mahasiswa	: **1611021095**
Program Studi	: **Ekonomi Pembangunan**
Fakultas	: **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.
NIP 19770212 200604 1 001

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP 19631215 198903 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.**

Penguji I : **Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.**

Penguji II : **Asih Murwiati, S.E., M.E.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Oktober 2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Wibowo

NPM : 1611021095

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Faktor-faktor Ekonomi Yang Bepengaruh Terhadap Kualitas Lingkungan Pulau Sumatera Dalam Perspektif Spasial" merupakan hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pemikiran dari penulis yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2022
Penulis.

Imam Wibowo

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Imam Wibowo yang lahir di Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 1998, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Joko Subagio dan Ibu Sri Hartuti, S.Pd.

Penulis mengawali pendidikan formal pada Tahun 2003 di TKIT Baitul Muslim Way Jepara, yang diselesaikan pada Tahun 2004. Penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar di SDIT Baitul Muslim Way Jepara, yang diselesaikan pada Tahun 2010. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam YPI 3 Way Jepara, yang diselesaikan pada Tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas yaitu SMAS IT Baitul Muslim Way Jepara yang diselesaikan pada Tahun 2016. Pada saat SMA penulis aktif di berbagai organisasi yaitu Pramuka, Robotik, ROHIS dan OSIS.

Pada Tahun 2016 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur Ujian SBMPTN Reguler Universitas Lampung. Selama masa kuliah penulis juga telah mengikuti kegiatan organisasi kampus, yaitu Anggota Muda Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (Himepa) Tahun 2016/2017, Anggota Muda dan Pengurus UKM-F ROIS FEB 2016/2018, dan Anggota Muda UKM-U BIROHMAH 2017/2018. Penulis juga mendapatkan beasiswa BIDIKMISI melalui jalur kuota tambahan yang di sediakan Universitas Lampung selama 8 semester periode Tahun 2016-2020. Pada Tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang maha segala-galaNya atas berkat rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan, dan shalawat beriring salam yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segenap ketulusan dari hati yang terdalam, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan terima kasih kepada:

Ayahanda Joko Subagio dan Ibu Sri Hartuti, S.Pd. Terima kasih atas doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tulus selama ini selalu memberikan bimbingan, dorongan, semangat, motivasi terbesar untuk mewujudkan keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kakakku tercinta Ahmad Fuady, S.Pd., M.M. dan adikku tersayang Hidayat Nurwahid, Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, kasih sayang, canda tawa dan semangat yang telah kalian berikan.

Sahabat-sahabat tercinta yang dengan tulus menyayangiku, saling mendoakan, memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan kepadaku.

Dosen serta staff Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Almamater Universitas Lampung tercinta.

MOTTO

Tunjukilah kami jalan yang lurus.

(QS. Al Fatihah: 6).

Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?

(QS. Ar-Rahman: 13).

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah: 8).

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, Kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

(QS. Ar Ra'd: 11).

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang beriman.

(QS. Ali Imran: 139).

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.

(H.R. Bukhari).

SANWACANA

Alhamdulillahirobil ‘alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Konsumsi Perkapita Terhadap Upah Minimum Provinsi Di Pulau Sumatera Periode Tahun 2015-2020” yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak memperoleh dukungan dan bantuan oleh berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran serta, memberikan arahan, ilmu, dan saran kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran serta, memberikan arahan, ilmu, dan saran kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Dedi Yuliawan, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Si. selaku dosen penguji dan pembahas yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

6. Ibu Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si. selaku pembimbing akademik yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan arahan baik dibidang akademik maupun hal lainnya.
7. Dosen serta Staff Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayah Joko Subagio dan Ibu Sri Hartuti, S.Pd. serta kedua orang tua asuh yaitu Paman dan Bibiku tercinta, Dr. Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, M.M. dan Dra. Hj. Sri Puji Astuti atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tidak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya, Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kasih sayang, dan surga-Nya kelak
9. Kakakku tercinta Ahmad Fuady, S.Pd., M.M. dan adikku tersayang Hidayat Nurwahid, yang selalu mendukung dan selalu mendoakan keberhasilan untuk saudaranya. Terimakasih untuk kasih sayang dan dukungan kalian.
10. Teman-taman yang selalu berbagi kisah Figa, Ridho, Aziz, Seno, Gerry, Yoga, Adrian, Mardiyanto, Hendra, Sandes, Andrian, Suntoro, Dhimas, Rizky, Annisa, Maharani, Armoiyani, Reviyana, Ridia Maharani, Mita dan Sinta terimakasih atas canda, tawa, dan keceriaan yang telah diberikan selama ini, sebagai penyemangat dalam proses penyelesaian studi ini.
11. Sepupuku yang selalu mendukung kegiatanku Aldo, Ihsan, Imad, Sultan, Fathia, Sabilla, Dzakia, dan Zulfa terimakasih atas canda, tawa, dan keceriaan yang telah diberikan selama ini.
12. Keluarga besar EP’16 terimakasih atas canda tawa dan kenangan terindah selama kuliah yang selalu saling mendukung untuk mencapai satu tujuan yang kita harapkan bersama dari awal masuk kuliah.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022
Penulis,

Imam Wibowo
NPM 1611021095

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Manfaat Penelitian 10

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Teoritis 11

1. Teori Upah 11
2. Upah Minimum 14
3. Kebijakan Upah Minimum Dalam UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 15
4. Pertumbuhan Ekonomi 16
5. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Provinsi 18
6. Inflasi 18
7. Hubungan Inflasi Terhadap Upah Minimum Provinsi 21
8. Konsumsi Perkapita 21
9. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Provinsi 23

2.2 Tinjauan Empiris 24

2.3 Kerangka Pemikiran 26

2.4 Hipotesis 28

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data 29
3.2 Definisi Operasional Variabel 29
3.3 Alat Analisis 31
3.4 Prosedur Analisis Data 32
3.4.1 Uji Asumsi Klasik 32
1) Uji Normlitas 32
2) Uji Multikolinieritas 33
3) Uji Heterroskedastisitas 33
4) Uji Autokorelasi 34
3.4.2 Uji Regresi Data Panel 35
3.4.3 Penentuan Metode Estimasi 37
1) Uji Chow 37
2) Uji Hausman 38
3) Uji Lagrange Multiplier 38
3.5 Uji Hipotesis 39
3.5.1 Uji t 39
3.5.2 Uji F 40
3.5.3 Koefisien Determinan (R^2) 40

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskripstif 41
4.2 Uji Asumsi Klasik 42
1) Uji Normalitas 42
2) Uji Multikolinieritas 43
3) Uji Heteroskedastisitas 43
4) Uji Autokorelasi 44
4.3 Penentuan Model Regresi 45
1) Uji Chow 45
2) Uji Hausman 46
3) Uji Lagrange Multiplier 46
4.4 Hasil Estimasi Regresi Data Panel 47
4.5 Uji Hipotesis 48
1) Uji t 48

2) Uji-F 49
3) Koefisien Determinan 50
4.6 Pembahasan 50
1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap UMP di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020 51
2) Pengaruh Inflasi terhadap UMP di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020.....52
3) Pengaruh Konsumsi Perkapita terhadap UMP di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020 53
4.7 Analisis *Individual Effect* 54

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN..... 56
5.2 SARAN 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. UMP di Pulau Sumatera tahun 2015-2020 4

Tabel 2. Peneitian Terdahulu 23

Tabel 3. Variabel Penelitian 28

Tabel 4. Analisis Deskriptif 40

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas…….....41

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas……..……...42

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas……..43

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi……...……43

Tabel 9. Hasil Uji Chow.....44

Tabel 10. Hasil Uji Hausman……45

Tabel 11. Hasil Uji Lagrange Multiplier Breusch-Pagan……..45

Tabel 12. Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model…….....46

Tabel 13. Hasil Uji t……..……47

Tabel 14. Hasil Uji F……48

Tabel 15. *Individual Effect*……52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Diagram Rata-rata Upah Minimum Provinsi di Indonesia tahun 2015-2020……..…….3

Gambar 2. Diagram Rata-rata UMP di Indonesia berdasarkan pulau tahun 2015-2020……..……..3

Gambar 3. Diagram Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020……...6

Gambar 4. Diagram Rata-rata Inflasi Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020……..…..7

Gambar 5. Diagram Rata-rata Konsumsi Perkapita Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020 ……..…….....8

Gambar 6. Kerangka Pemikiran……...25

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan pembangunan ekonomi, pastinya akan ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi suatu negara yang akan mempengaruhi perekonomian negara tersebut, hal itu lah yang menjadi pembeda antara negara yang maju dan negara yang berkembang. Pada negara maju, masalah pembangunan ekonomi yang umum dihadapi adalah kurangnya permintaan sehingga menghambat pertumbuhan output. Sedangkan di negara berkembang, masalah pembangunan ekonomi yang paling umum dihadapi adalah kurangnya penawaran barang dan jasa sehingga menghalangi laju pertumbuhan ekonomi. Rendahnya penawaran terhadap barang dan jasa di Indonesia, menjadi alasan Indonesia masih menjadi salah satu negara yang berkembang, hal itu dapat dilihat dari rendahnya tingkat produktivitas yang dapat diukur dari pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita atau PDB per kapita pekerja yang kecil. Pendapatan per kapita yang kecil disebabkan oleh rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi mereka yang hanya berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. (kompas, 2021)

Kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari pertumbuhan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Jika pertumbuhan ekonomi lancar, maka jumlah orang tertampung dalam suatu lapangan pekerjaan makin besar. Sebaliknya jika perekonomian suatu negara dalam keadaan makmur maka makin kecil jumlah orang yang menganggur (Kistanto, 2013).

Ketenagakerjaan merupakan hal yang perlu diperhatikan di Indonesia, karena hubungan industrial terdiri dari pengusaha, perkerja/buruh dan pemerintah mempunyai masalah umum dan mendasar, salah satunya adalah masalah upah pekerja/buruh. Dalam hubungan kerja haruslah dibuat perjanjian kerja yang berisikan tentang hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha haruslah seimbang dalam memberikan perlindungan pekerja/buruh dan memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah yang layak bagi kemanusiaan tersebut diarahkan pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (Susanto, 2015).

Salah satu faktor penentu efisiensi pasar tenaga kerja adalah upah buruh semakin murah yang akan memberikan kontribusi semakin besar dalam menurunkan biaya produksi. Upah masih tetap menjadi persoalan utama negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan pasar kerja Indonesia yang dualistik dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah di lain sisi sehingga menyebabkan upah menjadi isu sentral dalam bidang ketenagakerjaan (Izzaty, 2013). Upah merupakan faktor utama yang dapat mendorong semangat kerja sehingga diharapkan produktivitas perusahaan akan semakin meningkat. Upah merupakan balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja dan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga secara layak sehingga dapat memusatkan tugas yang dipercayakan kepadanya. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Kaufman (2000), tujuan utama ditetapkanya upah miniumum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah salah satu bentuk usaha untuk mengangakat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan

masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat. Rata-rata upah minimum Provinsi di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut.

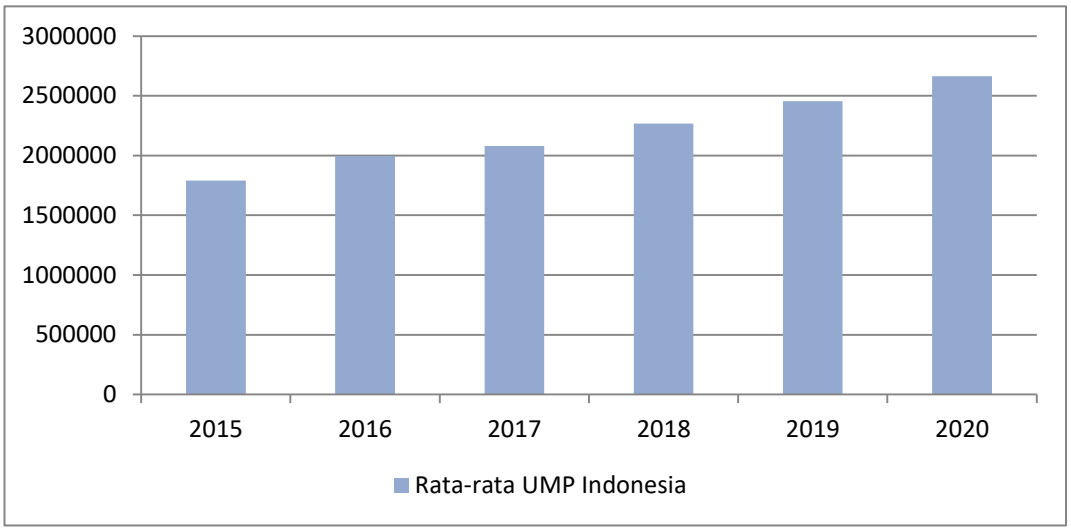

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2021)
Gambar 1. Diagram Rata-rata Upah Minimum Provinsi di Indonesia tahun 2015-2020

Berdasarkan Gambar 1, rata-rata UMP di Indonesia selalu naik setiap tahunnya. Pada tahun 2015 rata-rata UMP sebesar RP1.790.342 hingga pada tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp2.664.186 Setiap provinsi menetapkan upah minimum berbeda-beda di setiap wilayahnya sesuai dengan tingkat kebutuhan dari setiap masyarakat di wilayah tersebut.

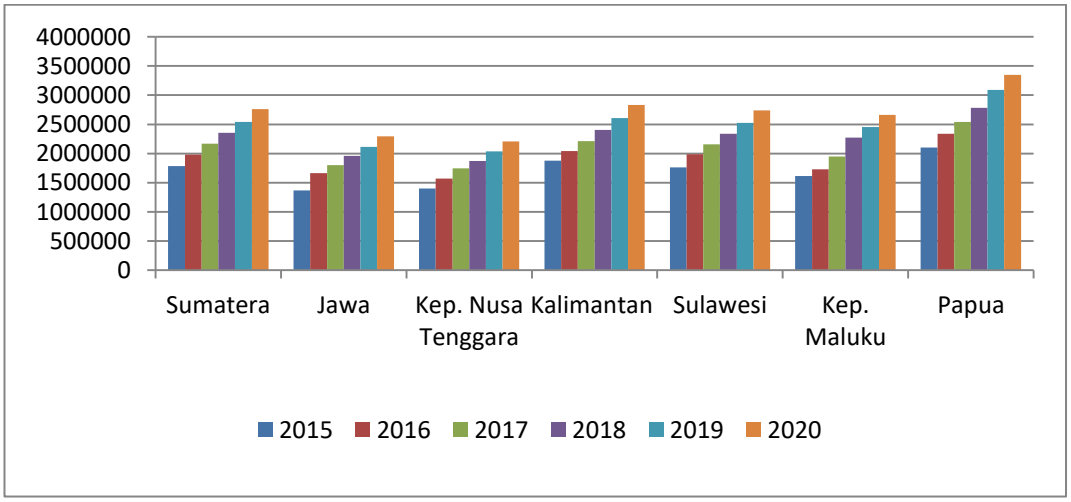

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2021)
Gambar 2. Diagram Rata-rata UMP di Indonesia berdasarkan pulau tahun 2015-2020

Pada Gambar 2 memperlihatkan gambaran rata-rata UMP berdasarkan pulau di Indonesia, pada Pulau Papua menduduki UMP tertinggi di Indonesia dan UMP terendah berada di Kep. Nusa Tenggara sedangkan Pulau Sumatera menduduki UMP peringkat terbesar ketiga di Indonesia.

Wilayah Pualu Sumatera memiliki posisi yang cukup strategis baik ditinjau dalam lingkup Nasional, regional ASEAN, maupun global. Dalam lingkup nasional wilayah Pulau Sumatera merupakan sentra produksi (karet dan kelapa sawit) dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi (pertambangan dan batubara) nasional. Secara geografis dalam lingkup regional ASEAN, Wilayah Pulau Sumatera menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia untuk Negara-negara yang berada di ASEAN. dalam lingkup global, secara geostrategis wilayah Pulau Sumatera diharapkan menjadi gerbang ekonomi nasional untuk mencapai pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur,dan Australia (bpiw.pu, 2021). Untuk itu diharapkan dengan keunggulan ekonomi yang dimiliki Pulau Sumatera dapat meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat di Pulau Sumatera.

Di bawah ini adalah tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh provinsi yang ada di Pulau Sumatera dari tahun 2015 hingga tahun 2020.

Tabel 1. UMP di Pulau Sumatera tahun 2015-2020

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	1900000	2118500	2500000	2717750	2916810	3165030
Sumatera Utara	1625000	1811875	1961354	2132188	2303403	2499422
Sumatera Barat	1615000	1800725	1949284	2119067	2289228	2484041
Riau	1878000	2095000	2266722	2464154	2662025	2888563
Jambi	1710000	1906650	2063000	2243718	2423889	2630161
Sumatera Selatan	1974346	2206000	2388000	1888741	2804453	3043111
Bengkulu	1500000	1605000	1730000	2595995	2040000	2213604
Lampung	1581000	1763000	1908447	2074673	2240646	2431324
Kep. Bangka Belitung	2100000	2341500	2534673	2755443	2976705	3230022
Kep. Riau	1954000	2178710	2358454	2563875	2769683	3005383
Rata_rata UMP Indonesia	1790342	1997819	2079324	2266437	2455245	2759066

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2021)

Berdasarkan Tabel 1 upah minimum Provinsi di Pulau Sumatera mengalami ketimpangan, dimana lima provinsi yaitu Provinsi Aceh, Riau,Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung dan Kep. Riau sudah menetapkan UMP diatas rata-rata UMP di Indonesia namun lima provinsi lainnya masih dibawah rata-rata UMP Inedonesia. UMP tertinggi berada di Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tahun 2020 menetapkan sebesar Rp2.976.705, sedangkan yang menetapkan UMP terendah di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 menetapkan UMP sebesar Rp2.040.000. Sebagian Provinsi di Pulau Sumatera masih menetapkan UMP dibawah rata-rata UMP Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp2.455.245.

Penetapan Upah minimum didasarkan standar biaya hidup masyarakat dengan mempertimbangkan tingkat Kebutahan Hidup Layak (KHL) di setiap daerah. Peraturan mengenai KHL, diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu yang membahasan tentang ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Namun pada tahun 2020 ditetapkan peraturan baru yaitu Pemerintah mengubah ketentuan pengupahan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan itu diantaranya penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Sebelumnya tercantum pada pasal 89 dan 90 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan sebagai gantinya pemerintah memberikan kewajiban bagi gubernur menetapkan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota dengan syarat tertentu yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi (Mangeswuri, 2020). Artinya Undang-Undang hanya mewajibkan penetapan upah minimum untuk provinsi saja, pada tingkat kabupaten/kota hanya opsional/pilihan saja. Ketentuan upah minimum kabupaten yang harus lebih tinggi dari provinsi bisa jadi upah minimum provinsi tidak representatif terhadap kebutuhan layak di kabupaten (Sigit, 2020).

Indonesia dengan aturan Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi ini memuat variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Kemudian upah dihitung dengan formula perhitungan upah minimum, yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Apabila disimulasikan formula perhitungan upahnya yaitu pertama menentukan batas atas dan batas bawah dari upah minimum itu sendiri dengan rumusan rata-rata konsumsi perkapita di kali rata-rata banyaknya anggota rumah tangga dibagi rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah dan batas bawah hasil dari batas atas dikali 50 persen. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai UMP menurut UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Konsumsi Perkapita (Korida & Muhsin, 2021).

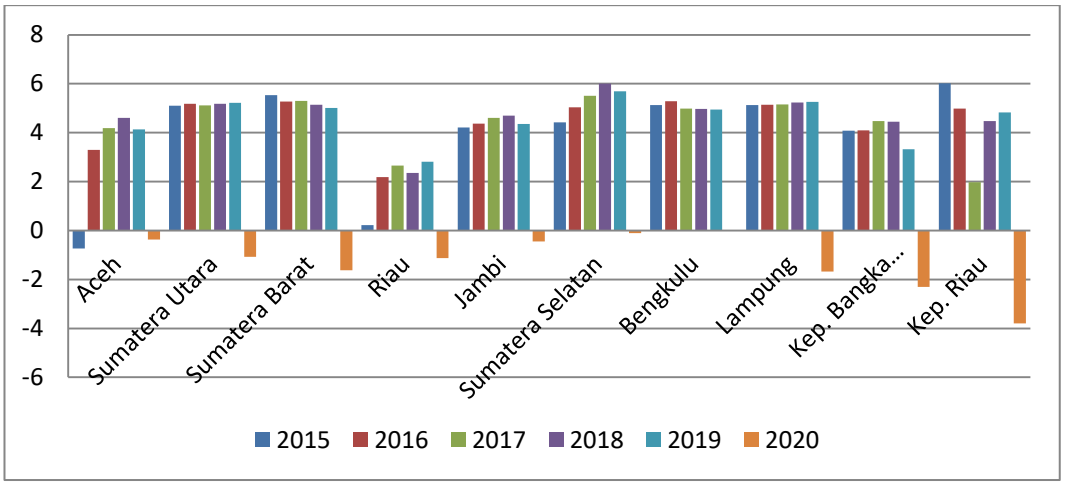

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2021)
Gambar 3. Diagram Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020

Dari Gambar 3 diatas, menunjukan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020 dimana Pertumbuhan Ekonomi yang tertinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu di Provinsi Kep. Riau yaitu sebesar 6,02 persen dengan UMP saat itu sebesar Rp3.005.383. Pertumbuhan Ekonomi terendah juga terdapat di Provinsi Kep. Riau pada tahun 2020 yaitu sebesar -3,8 persen dengan UMP saat itu sebesar Rp3.005.383. Upah minimum suatu wilayah akan merepresentasikan kesejahteraan di wilayah tersebut, di mana semakin tinggi tingkat upah minimum di suatu wilayah maka akan semakin sejahtera pula masyarakatnya.

Menurut *sollow dan swan* pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertumbuhan modal, penduduk, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perekonomian di suatu daerah, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah diasumsikan masyarakat yang ada di daerah tersebut semakin sejahtera.

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan erat dengan penetapan upah minimum regional. Ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan berdampak pada penetapan upah minimum yang juga mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Sulistiawati, 2012), yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan meningkatkan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Charysa, (2013) yaitu menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap upah minimum regional di Jawa Tengah.

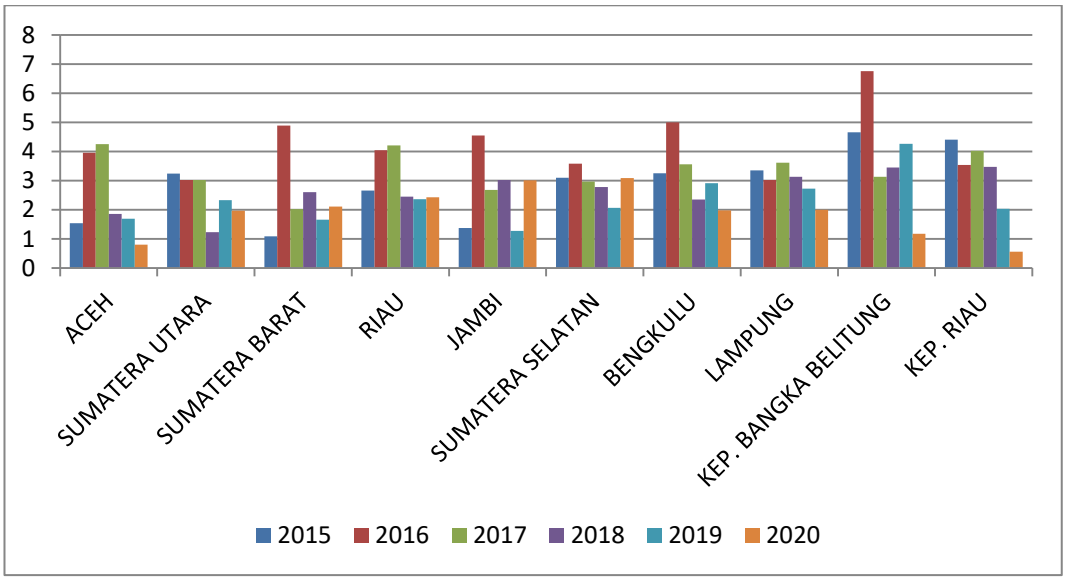

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2021)
Gambar 4. Diagram Rata-rata Inflai Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020

Dari Gambar 4 diatas, menunjukan Inflasi Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020 dimana Inflasi yang tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu di Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 6,75 persen dengan UMP saat itu sebesar

Rp2.976.705. Inflasi terendah terdapat di Provinsi Kep. Riau yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,56 persen dengan UMP saat itu sebesar Rp3.005.383.

Teori cost push inflation (Sholeh, 2012) yang menyatakan bahwa kenaikan oleh perusahaan dikalkulasikan sebagai kenaikan biaya produksi. Perusahaan berusaha menutup kenaikan biaya produksi tersebut dengan cara menaikkan harga output. Proses selanjutnya adalah kenaikan harga-harga barang di pasar yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi.

Berdasarkan formula Upah Minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan Upah Minimum, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga di masing-masing wilayah (Kemnaker, 2020). Kebijakan pengupahan merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan layak bagi kemanusiaan, yakni jumlah pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kehidupan mereka dan keluarganya secara wajar. Formula penyesuaian upah minimum baru yaitu menghitung batas atas upah minimum, memasukkan nilai rata-rata konsumsi per kapita dikalikan rata-rata jumlah anggota rumah tangga dan dibagi rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja (republika.id, 2021).

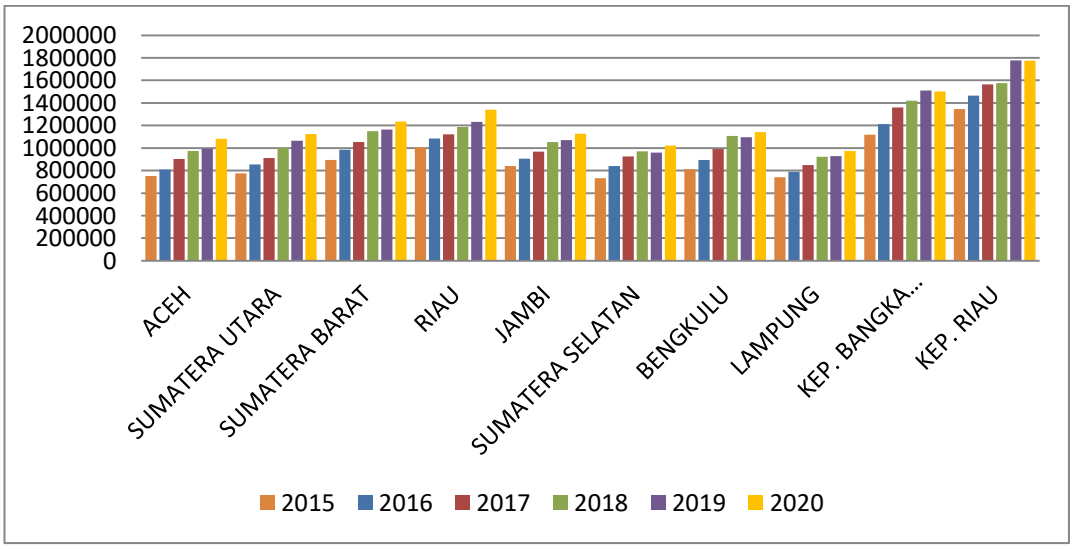

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah tahun 2021)
Gambar 5. Diagram Rata-rata Konsumsi Perkapira Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020

Dari Gambar 5 diatas, menunjukan Konsumsi Perkapita Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2020 dimana Konsumsi Perkapita yang tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu di Provinsi Kep. Riau yaitu sebesa Rp1.778.150 dengan UMP saat itu sebesar Rp2.769.683. Konsumsi Perkapita terendah terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp731.429 dengan UMP saat itu sebesar Rp 1.974.346. Ketika Konsumsi Perkapita suatu wilayah meningkat yang menyebabkan daya beli masyarakat naik, hal ini akan mengakibatkan permintaan barang dan jasa bertambah sehingga perusahaan menambah jumlah produksinya agar pendapatan meningkat. Pendapatan meningkat selayaknya upah ditingkatkan karena pekerjaan tenaga kerja bertambah.

Berdasarkan latar belakang Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Konsumsi Perkapita dapat mempengaruhi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Sumatera. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Konsumsi Perkapita Terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera Periode Tahun 2015-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020?
2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020?
3. Apakah Konsumsi Perkapita berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Konsumsi Perkapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh Konsumsi Perkapita terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Konsumsi Perkapita terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomidi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan Universitas Lampung, sehingga dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai data dan informasi untuk kegiatan belajar. Selain itu, penelitiaan ini menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan dalam memberikan pendidikan kepada mahasiswa.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Teoritis

1. Teori Upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama buruh/pekerja melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang- undang No. 13 tahun 2003 upah adalah "hak pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan" (Yustisia, 2016).

Upah merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam masalah ketenagakerjaan. Hal ini karena keinginan orang bekera adalah untuk mendapatkan upah yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup. Bila tingkat upah yang ditawarkan oleh pengusaha dinilai tidak mencukupi oleh pekerja, maka pekerja tersebut tidak akan menerima pekerjaan yang ditawarkan. Sebaliknya, ada juga pekerja yang bekerja dengan tingkat upah berapapun. Upah adalah balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Menurut ekonomi klasik, upah adalah harga untuk faktor produksi tenaga kerja. Harga tersebut haruslah bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin kehidupan yang layak (Sukwiaty, 2006).

Dengan demikian, menurut UU No. 13 tahun 2003, upah merupakan hak dari pekerja/buruh yang harus ditentukan sedemikian rupa sehingga merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan bagi pekerja/buruh. Oleh karena itu, menurut UU No. 13 tahun 2003 kebijakan perlindungan pengupahan meliputi:

a. Upah minimum
b. Upah kerja lembur
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
f. Bentuk dan cara pembayaran upah
g. Denda dan potongan upah
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
j. Upah untuk pembayaran pesangon, dan
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Teori yang harus diperhatikan sebagai teori dasar untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut: (Zaeni Ashyadie, 2007)

a) Teori Upah Normal (David Ricardo)

   Menurut teori ini, upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk membiayai segala keperluan hidup pekerja/buruh atau tenaga kerja. Dengan teori ini ditegaskan kepada pekerja/buruh bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sewajarnya demikian besarnya karena memang hanya demikian kemampuan pengusaha.

b) Teori Undang-Undang Upah Besi (Lasalle)

   Menurut teori ini, upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh berdasarkan teori upah normal di atas hanya memenangkan pengusaha. Sebab, kalau teori itu yang dipergunakan, mudah saja kemampuannya tanpa berfikir bagaimana sulitnya pekerja/buruh itu.

c) Teori Dana Upah (Stuart Mill Senior)

   Menurut teori ini, pekerja/buruh tidak perlu menentang seperti yang dikemukakan oleh teori undang-undang upah besi karena upah yang diterimanya itu sebetulnya berdasarkan pada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana jumlah besar, maka akan besar pula upah yang akan diterima pekerja/buruh. Sebaliknya, kalau dana itu berkurang, jumlah upah yang di terima pekerja/buruh pun akan berkurang.

d) Teori Upah Etika

Menurut teori ini, yang dipersoalkan sebenarnya bukanlah berapa besarnya upah yang diterima pekerja/buruh, melainkan sampai seberapa jauh upah tersebut mampu mencukupi segala kebutuhan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya. Oleh karena itu, dianjurkan oleh teori ini bahwa untuk menunjang keperluan hidup buruh yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh pengusaha atau Negara yang disebut dana anak-anak.

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Upah Nominal

Upah nominal adalah seumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang behak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b) Upah nyata

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari:

1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

c) Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

d) Upah minimum

Upah minimum terdiri atas:

1) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota
2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota

e) Upah wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atau jasa- jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:

1) Kondisi perekonomian Negara
2) Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada
3) Perturan perpajakan
4) Standart hidup para pekerja/buruh itu sendiri
5) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara

2. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standart, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan diterapkannya upah minimum yaitu:

1) Untuk menonjolkan arti atau peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja
2) Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan
3) Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan
4) Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan
5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standart hidup secara normal.

Upah minimum diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-726/MEN/2000 tentangn Perubahan Pasal1, Pasal 3,

Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum terdiri atas:

a. Upah minimum Provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu provinsi
b. Upah minimum Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota
c. Upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota di satu Provinsi
d. Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah mengubah ketentuan pengupahan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan itu diantaranya penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Sebelumnya tercantum pada pasal 89 dan 90 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan sebagai gantinya pemerintah memberikan kewajiban bagi gubernur menetapkan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota dengan syarat tertentu yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi (Mangeswuri, 2020).

3. Kebijakan Upah Minimum Dalam UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima sebagai bentuk imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu, sebagai pekerja kita wajib untuk mengerti peraturan mengenai Pengupahan yang berlaku di Indonesia saat ini.

PP 36/2021, Pasal 26:

a. Penyesuaian nilai Upah minimum dilakukan setiap tahun.

b. Penyesuaian nilai Upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah Upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.
c. Batas atas Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Batas atas UM(t) = Rata - rata konsumsi per kapita(t) x Rata - rata banyaknya ART(t)／Rata - rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga(t)

d. Batas bawah Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum terendah yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Batas bawah UM(t) = Batas atas UM(t) x 50%

e. Nilai Upah minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagai berikut:

UM(t = 1) = UM (t) + { Max (PE(t), Inflasi(t)) x [Batas atas (t) − UM(t)／Batas atas(t)− Batas bawah(t) x UM(t)] }

f. Rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada setiap rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data di wilayah yang bersangkutan.
g. Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi.
h. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan salah satu indikator makro-ekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun (Prasetyo, 2009). Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan

output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Adisasmita, 2013).

Perhitungan pertumbuhan ekonomi tingkat Provinsi ini dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perthitungan pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun dirumuskan sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \, x \, 100\%$$

Dimana:

PE : Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_t$: PDRB tahun ke t

$PDRB_{t-1}$: PDRB tahun ke t-1

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro Ketiganya adalah:

a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selajutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
c. Kemajuan teknologi.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*) (Afrizal, 2013).

a. Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.
b. Pemerataan (*equity*), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.
c. Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

5. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Provinsi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi untuk menghasilkan pertambahan output, yang umumnya diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah (Dama et al., 2016). Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output per kapita yang menunjukkan pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar hidup (Paul, 1992).

Menurut Ardana, salah satu faktor satu faktor yang mempengaruhi pemberian upah yaitu kondisi perekonomian. Bila kondisi perekonomian sedang maju maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar, karena mendekati kondisi full employment. Sebaliknya jika kondisi perekonomian kurang maju (depresi) maka tingkat upah akan rendah karena terdapat banyak pengangguran (*disquashed un employment*) (Kertiasih, 2017).

6. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum yang berlaku dalam suatuperekonomian dari suatu periode ke periode lainnya, sedangkan tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu

berbanding dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2015). Menurut Froyen (2013), inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus yang terjadi dalam periode tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas (Adiwarman, 2010).

Menurut Boediono (2008) definisi singkat dari Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut Inflasi. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus menerus juga perlu digaris-bawahi. Kenaikan harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, yang sifatnya hanya sementara tidak disebut inflasi.

Untuk menentukan inflasi perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari satu periode tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada periode sebelumnya. Rumus yang dipakai untuk menentukan laju inflasi adalah sebagai berikut (Suharyadi dan Purwanto, 2003):

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \; x \; 100\%$$

dimana :

π	= Laju Inflasi
IHKt	= Indeks harga konsumen periode ke t
IHKt-1	= Indeks harga konsumen periode ke t-1 (periode lalu)

Ada beberapa teori mengenai inflasi, diantaranya:

a. Teori kuantitas uang adalah teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher padatahun 1911. Fisher berpendapat bahwa jumlah uang beredar adalah penyebab dari inflasi, jika jumlah uang beredar lebih banyak dari produksi barang dan jasa maka harga dari barang dan jasa tersebut akan naik secara terus menerus. Fisher merumuskan sebagai berikut:

$$M \times V = P \times T$$

Keterangan:

M = Jumlah uang beredar

V = Perputaran uang dalam satu periode biasanya dalam satu tahun

P = Harga

T = Transaksi

Dalam persamaan tersebut menyebutkan jumlah uang beredar dikalikan perputaran uang sama dengan harga dikalikan transaksi, jadi apabila jumlah uang yang beredar semakin banyak akan menyebabkan kenaikan harga-hargadan menyebabkan inflasi terjadi.

b. Teori inflasi menurut Keynes yang beranggapan bahwa inflasi tidak hanya terjadi karena jumlah uang beredar melainkan karena kelebihan permintaan masyarakat pada suatu barang dan jasa.

c. Teori inflasi moneterisme yang berpendapat bahwa inflasi terjadi karenaadanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ekspansif sehingga banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat yang menyebabkan permintaan akan barang dan jasa meningkat namun tidak diikuti dengan bertambahnya tingkat produksi sehingga menyebabkan inflasi. Biasanya dilakukan kebijakan moneter kontraktif agar jumlah uang beredar berkurang.

d. Teori ekspansif yang dikemukakan oleh Dornbusch yang menyatakanbahwa biasanya pelaku ekonomi mempunyai ekspektasi laju inflasi di masa yang akan datang berdasarkan ekspektasi adaptif dan ekspektasi rasionalyang biasanya menggunakan pengukuran di masa sekarang secara realistis melalui informasi yang ada.

e. Teori strukturalis yang menyebutkan bahwa penyebab inflasi dikarenakan kekakuan struktur perekonomian suatu negara terutama pada penawaran bahan makanan dan penerimaan barang eskpor.

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus menerus juga perlu digaris-bawahi. Kenaikan harga-harga karena, misalnya musiman,

menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, yang sifatnya hanya sementara tidak disebut inflasi.

7. Hubungan Inflasi Terhadap Upah Minimum Provinsi

Rendahnya inflasi ini memberi angin segar bagi pekerja yang ada di provinsi Jambi karena harga-harga kebutuhan hidup masih relative terjangkau dan pada batas normal. Secara teoritis peningkatan inflasi akan mengurangi nilai uang suatu negara. Disamping itu, kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahanperubahan dalam output dan kesempatan kerja. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada upah, karean pekerja akan menuntut adanya kenaikan upah (MS, 2014).

Sementara pengusaha berupaya untuk memaksimumkan keuntungan dengan meningkatkan produktivitas kerja. Akibatnya, apabila ada tuntutan pekerja akan kenaikan tingkat upah ini menyebabkan pengusaha akan mengurangi kesempatan kerja atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan kecil. Sebaliknya, apabila upah meningkat maka secara tidak langsung akan membuat kenaikan harga-harga di pasaran. Hal ini diasumsikan bahwa ketika seseorang memperoleh upah yang lebih besar maka seseorang tersebut akan menggunakan upahnya untuk membeli kebutuhan secara berlebih, sehingga ketika upah naik maka inflasi juga akan lebih tinggi (MS, 2014).

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap (Huda, 2015). Jika disimpulkan inflasi mempunyai hubungan dengan upah minimum karena naik turunnya upah dipengaruhi oleh faktor harga (inflasi).

8. Konsumsi Perkapita

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang

dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain (James, 2001).

Menurut Mankiw (2013) konsumsi mempunyai arti sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga.Arti dari barang disini mencakup pembelanjaan rumah tangga untuk barang yang bertahan lama, seperti kendaraan dan perlengkapanperlengkapan rumah tangga, dan untuk barang yang tidak tahan lama contohnya seperti makanan dan pakaian. Sedangkan untuk arti dari jasa disini mencakup barang yang tidak berwujud konkert, misalnya seperti potong rambut dan perawatan kesehatan. Selain itu pembelanjaan rumah tangga untuk pendidikan juga termasuk ke dalam konsumsi jasa.

Teori Keynes mengandalkan analisis statistik dan juga membuat dugaandugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kasual. Menurut Keynes setiap penambahan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat akan digunakan untuk menambah konsumsinya, tetapi besarnya kecenderungan konsumsi itu tidak pernah negatif dan lebih besar dari satu. Berdasarkan hipotesisnya Keynes membuat formulasi fungsi konsumsi sebagai berikut (Chalid, 2010):

$$C = a + bY$$

Keterangan :

C : nilai konsumsi yang dilakukan semua rumah tangga dalam perekonomian

a : konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0

b : besarnya pendapatan yang digunakan untuk menambah konsumsi (Marginal Propensity to Consume/ MPC)

Y : Pendapatan disposabel

Fungsi konsumsi merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (pendapatan disposabel) perekonomian tersebut. Tingkat konsumsi

seseorang sangat dipengaruhi oleh pendapatan, jumlah konsumsi akan meningkat jika pendapatan meningkat, akan tetapi kecenderungan mengkonsumsi akan menurun jika pendapatan meningkat, maka jika terjadi peningkatan pendapatan maka kecenderungan seseorang untuk melakukan *saving* (menabung) akan meningkat.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli mbarang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup sehari-hari bagi anggota rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga pada periode tententu (BPS, 2021). Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk (BPS, 2021).

9. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Upah Minimum Provinsi

Jumlah pengeluaran untuk konsumsi pangan pada suatu rumah tangga dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Dengan kata lain semakin tinggi pengeluaran konsumsi pangan, maka semakin rendah

tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Sebaliknya, semakin kecil jumlah pengeluaran konsumsi pangan maka rumah tangga tersebut semakin sejahtera (Mulyanto, 2005).

Tingkat konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh pendapatan, jumlah konsumsi akan meningkat jika pendapatan meningkat, akan tetapi kecenderungan mengkonsumsi akan menurun jika pendapatan meningkat, maka jika terjadi peningkatan pendapatan maka kecenderungan seseorang untuk melakukan *saving* (menabung) akan meningkat. Jika konsumsi perkapita tinggi, maka akan terjadi kenaikan upah minimum. Hal ini dikarenakan tingkat upah minimum mengacu pada tingkat kemakmuran suatu Negara yang dicerminkan oleh pendapatan perkapita yang tinggi. Apabila rasio Pendapatan per Kapita tinggi, maka akan terjadi kenaikan upah minimum. Menurut Keynes setiap penambahan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat akan digunakan untuk menambah konsumsinya.

2.2 Tinjauan Empiris

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba untuk mempelajari beberapa penelitian yang berkaitan dan relevan dengan topik yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut ditampilkan dalam Tabel ringkasan berikut ini.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Judul	Peneliti	Alat Analisis	Hasil
Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen terhadap upah minimum Provinsi Jambi	Armidi; Erfit; Yulmardi (2018) e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 7. No.1	analisis deskriftif dan analisis kuantitatif	Secara parsial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi sedangkan Indeks Harga Konsumen berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Rahmah Merdekawaty, Dwi Ispriyanti,	Spatial Autoregressive (SAR)	KHL berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMK di

Judul	Peneliti	Alat Analisis	Hasil
Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR)	JURNAL GAUSSIAN, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Halaman 525-534		Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, IHK berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan PDRB tidak berpengaruh terhadap UMK Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2016	Alan Mundi Wibowo (2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta	Partial Adjustment Model (PAM).	Berdasarkan hasil uji PAM menunjukan bahwa variabel IHK berpengaruh signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Upah Minimum Regional, variabel PDRB berpengaruh signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Upah Minimum Regional, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Upah Minimum Regional. dan variabel Invesati tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Regional
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014	Febrika Nurtiyas (2016) Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta	Analisis Data Panel	IHK tidak memiliki pengaruh signifikan. PDRB dan TPAK berpengaruh signifikan secara negatif. Pendapata Per Kapita berpengaruh siginifikan secara positif terhadap UMP

Judul	Peneliti	Alat Analisis	Hasil
Penyerapan Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Upah Minimum Di Indonesia	Bambang S. Susanto (2015) The Asia Pacific, Journal of Management Vol. 1 | No. 1	*metode pooled least square*	Penyerapan Tenaga Kerja mempunya pengaruh negatif dan signifikan terhadap UMP di Indonesia. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMP di Indonesia.
Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember	Ilham Kristanto (2013) Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember	OLS	KHL dan PDRB mempunyai penagruh yang positif dan signifikan terhadap UMK di Jember, sedangkan Inflasi mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap UMK di Jember.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, terdapat tiga faktor yang peneliti ambil yang diduga mempengaruhi penetapan UMP di Pulau Sumatera, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Konsumsi Perkapita.

Upah Minimum merupakan upah terendah yang akan dijadikan standart, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Penentuan upah tentu ada standar pertimbangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, standar itu disebut Kebutuha Hidup Layak (KHL). KHL adalah suatu ukuran kemampuan seorang pekerja dalam memenuhi semua kebutuhannya dalam satu bulan. Namun pada tahun 2020 ditetapkan peraturan baru yaitu Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana dalam peraturan tersebut berisi tentang variabel penetapan upah. Kemudian upah dihitung dengan formula perhitungan upah minimum, yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Apabila disimulasikan formula perhitungan upahnya yaitu pertama menentukan batas atas dan batas bawah dari upah minimum itu sendiri dengan rumusan rata-rata konsumsi

perkapita di kali rata-rata banyaknya anggota rumah tangga dibagi rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah dan batas bawah hasil dari batas atas dikali 50 persen. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai UMP menurut UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Konsumsi Perkapita (Korida & Muhsin, 2021).

Salah satu faktor satu faktor yang mempengaruhi pemberian upah yaitu kondisi perekonomian. Bila kondisi perekonomian sedang maju maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar, karena mendekati kondisi full employment. Sebaliknya jika kondisi perekonomian kurang maju (depresi) maka tingkat upah akan rendah karena terdapat banyak pengangguran (*disquashed un employment*).

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap (Huda, 2015). Jika disimpulkan inflasi mempunyai hubungan dengan upah minimum karena naik turunnya upah dipengaruhi oleh faktor harga (inflasi).

Tingkat konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh pendapatan, jumlah konsumsi akan meningkat jika pendapatan meningkat, akan tetapi kecenderungan mengkonsumsi akan menurun jika pendapatan meningkat, maka jika terjadi peningkatan pendapatan maka kecenderungan seseorang untuk melakukan *saving* (menabung) akan meningkat.

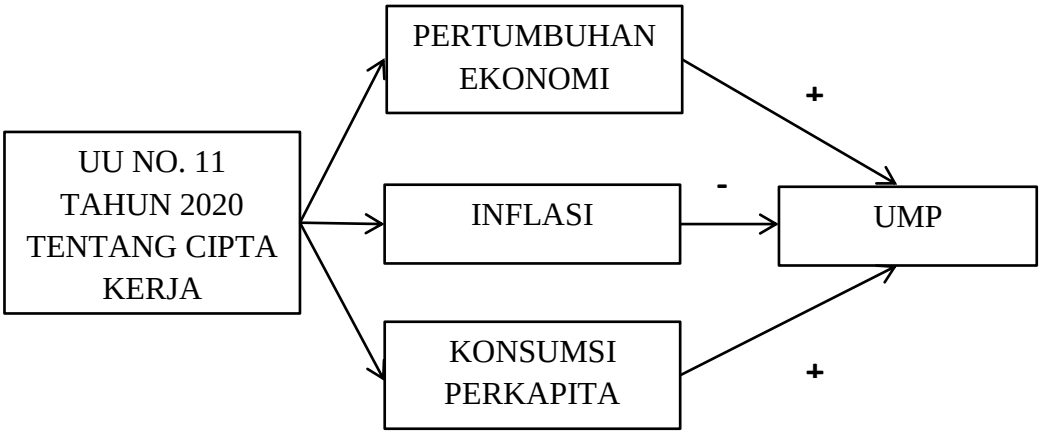

Gambar 6. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

1. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode 2015-2020.
2. Diduga Inflasi berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode 2015-2020.
3. Diduga Konsumsi Perkapita berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode 2015-2020.
4. Diduga Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Konsumsi Perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode 2015-2020.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) dan data *cross section*. Data yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Data penelitian mengunakan data 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini di rangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Periode	Satuan	Sumber Data
Upah Minimum Provinsi	UMP	Tahun	Rupiah	BPS.go.id
Pertumbuhan Ekonomi	PE	Tahun	Persen	BPS.go.id
Inflasi	INFL	Tahun	Persen	BPS.go.id
Konsumsi Perkapita	CP	Tahun	Rupiah	BPS.go.id

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan suatu standar upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang harus dipatuhi oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai atau buruh lajang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan didalam lingkungan

usaha kerja dalam bentuk rupiah pada tahun t. Data yang digunakan Upah Minimum 10 Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015 hingga 2020, data bersumber dari BPS.go.id.

2. Pertumbuhan Ekonomi (PE) merupakan peningkatan output riil dalam suatu perekonomian yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi menggunakan perhitungan peningkatan presentase dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan yang mana dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. PDRB menggambarkan nilai tambah barang atau jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perthitungan pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun dirumuskan sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \text{ x } 100\%$$

Data yang digunakan yaitu Pertumbuhan Ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015 hingga 2020, data bersumber dari BPS.go.id.

3. Inflasi (INFL) yaitu kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus menerus dalam periode waktu tertentu dan digunakan sebagai variabel yang mencerminkan efektivitas kebijakan moneter di Indonesia. Inflasi dapat dilihat dari data indeks harga konsumen dari satu periode tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada periode sebelumnya. Perthitungan inflasi masing-masing tahun dirumuskan sebagai berikut:

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \; x \; 100\%$$

Data inflasi yang digunakan Data yang digunakan yaitu Inflasi 10 Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015 hingga 2020, data bersumber dari BPS.go.id.

4. Konsumsi Perkapita (CP) yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup sehari-hari bagi anggota rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Data konsumsi perkapita yang digunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita untuk makanan dan bukan makanan di daerah perkotaan dan pedesaan menurut provinsi (rupiah). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga pada periode tententu. Data menggunakan data pengeluaran per kapita 10 Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015 hingga 2020, data bersumber dari BPS.go.id.

3.3 Alat Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program Eviews 10. Metode estimasi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yang meliputi: *common effect, fixed effect, dan random effect.* Model analisi data panel dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \ldots\ldots + \varepsilon_{it}$$

Metode ini akan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Konsumsi Perkapita terhadap UMP Provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2015 hingga 2020. Data dalam penelitian ini memiliki satuan yang berbeda-beda maka data terlebih dahulu dilakukan transformasi atau mengubah data ke dalam bentuk LN (Logaritma Natural) untuk memperkecil skala data dan untuk menormalkan distribusi data. Untuk menormalkan data runtun waktu dengan menggunakan mentranformasikan data dengan menggunakan LN (Logaritma Natural) (Rosyadi, 2012). Adapun bentuk model regresi data panel dalam penelitian ini:

$$LN_UMP_{it} = \beta_0 + \beta_1 LN_PE_{it} + \beta_2 LN_INFL_{it} + \beta_3 LN_CP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

UMP = Upah Minimum Provinsi

PE = Pertumbuhan Ekonomi

INFL = Inflasi

CP = Konsumsi Perkapita

LN = Logaritma Natural

e = Error term

i = 1,2,...n, menunjukkan jumlah lintas individu (*Cross section*)

t = 1,2,...t, menunjukkan dimensi runtun waktu (time series)

$\beta 0$ = Koefisien intersep

$\beta 1$- $\beta 3$ = Koefisien slope atau kemiringan

3.4 Prosedur Analisis Data

Analisis data adalah urutan-urutan yang dilakukan dalam melakukan analisis terhadap suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa prosedur analisis yaitu:

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik dilakukan dengan 4 uji yaitu sebagai berikut:

1) Uji Normlitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak. Penyimpangan asumsi normalitas akan semakin kecil pengaruhnya jika jumlah sampel diperbesar. Uji asumsi normalitas dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode *Jarque-Berra.* Nilai statistik *Jarque Bera* didasarkan pada *chi-squares.* Residual dikatakan memiliki distribusi normal jika *Jarque Bera* > *Chi square* atau probabilitas (*p-value*) > α = 5%.

Kriteria pengujiannya adalah:

H_0: *Jarque-Bera* > *Chi square*, *p-value* < 5%, data tidak terdistribusi dengan normal.

Ha: *Jarque-Bera* < *Chi square*, *p-value* > 5%, data terdistribusi dengan normal.

2) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan hubungan antara variabel independen dalam satu regresi. Deteksi Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang terdapat dalam model persamaan memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Dalam pengujian ini akan digunakan metode *variance inflation factor* untuk mendeteksi apakah ada multikolinieritas antar variabel yang digunakan. Model dikatakan mengandung multikolinieritas apabila VIF lebih dari 10 (Gujarati, 2003).

3) Uji Heterroskedastisitas

Uji *Heterokedastisitas* merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi kesamaan Heterokedastisitas adalah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel gangguan mempunyai rata-rata nol, mempunyai varian yang konstan atau $Var\ (e_i) = \sigma^2$ atau homokedastisitas atau justru heterokedastisitas. Dalam regresi linear berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut BLUE adalah var (ui) = σ^2 (konstan), semua error mempunyai variasi yang sama. Pada umumnya, heteroskedastisitas diperoleh pada data *Cross section*. Jika pada model dijumpai heteroskedastisitas, maka akan membuat varians residual dari variabel tidak konstan (tidak homoskedastisitas), sehingga menyebabkan model menjadi tidak efisien meskipun tidak bias dan konsisten. Dengan kata lain, jika regresi tetap

dilakukan meskipun ada masalah heteroskedastisitas, maka hasil regresi akan menjadi misleading (Gujarati, 2003).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengestimasi kembali data panel dengan menambahkan dan menjadikan varians residual sebagai variabel terikat untuk menentukan apakah dalam model penelitian terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak.

Kriteria Pengujian:

a. Menolak H_0, apabila dalam hasil estimasi varians residual terdapat sedikit variabel bebas yang memiliki prob < tingkat kepercayaan (α) sebesar 5%. Jika H_0 ditolak maka terdapat masalah heteroskedastisitas.
b. Menerima H_0, apabila dalam hasil estimasi varians residual terdapat banyak variabel bebas yang meiliki prob > tingkat kepercayaan (α) sebesar 5%. Jika H_0 diterima maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas (homoskedastisitas).

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena residual yang tidak bebas antar satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini disebabkan karena error pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data time series (runtut waktu). Deteksi autokorelasi pada data panel dapat melalui uji Durbin-Watson (Ghozali, 2011). Nilai uji Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif keputusan mengenai keberadaan autokorelasi sebagi berikut :

1) Jika d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif

2) Jika d > (4 – dl), berarti terdapat autokorelasi negatif

3) Jika du < d < (4 – dl), berarti tidak terdapat autokorelasi

4) Jika dl < d < du atau (4 – du), berarti tidak dapat disimpulkan

3.4.2 Uji Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang digunakan untuk menganalisis ukuran bank, fungsi intermediasi dan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi. Keuntungan-keuntungan yang didapat apabila menggunakan data panel antara lain: (1). Data panel yang terdiri dari data times series dan *Cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar; (2). Penggabungan informasi data *times series* dan *Cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul yaitu penghilangan variabel atau *omitted*-variabel (Widarjono, 2013).

Menurut Basuki (2015) pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Regresi panel yang hanya dipengaruhi oleh salah satu unit saja (unit cross-sectional atau unit waktu) disebut model komponen satu arah, sedangkan model regresi panel yang dipengaruhi oleh kedua unit (unit cross-sectional dan unit waktu) disebut model komponen dua arah.

Secara umum terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menduga model dari data panel yaitu model tanpa pengaruh individu (*common effect*) dan model dengan pengaruh individu *(fixed effect* dan *random effect*). Wibowo (2016) menjelaskan dalam melakukan analisa data panel dikenal tiga macam model pendekatan yaitu, 1) Pendekatan Kuadrat Terkecil (*Pooled Least Square/Common Effect*), 2) Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*), dan 3) Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*).

Dalam mengukur persamaan regresi menggunakan data panel, untuk keseimbangan datanya akan digunakan model regresi berganda unbalance panel. Dimana setiap unit *Cross sectionnya* memiliki jumlah observasi time series yang berbeda. Sedangkan dalam analisis menggunakan regresi data panel, untuk hasil estimasi dipilih salah satu model regresi data panel yang sesuai. Terdapat tiga model yang digunakan diantarnya:

1) Regresi data panel dengan *Common Effect Model*

Model *common effect* merupakan model estimasi yang menggabungkan data time series dan data *Cross section*. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga kita bisa menggunkan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2013).

2) Regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*

Model *fixed effect* mengasumsikan bahwa slope (koefisien regresi) tetap antar ruang dan waktu. Estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini disebut juga dengan Least Squares Dummy Variable (Widarjono, 2013).

3) Regresi data panel dengan *Random Effect Model*

Model random effect merupakan suatu model estimasi regresi data panel dengan asumsi koefisien slope konstan dan intersep berbeda antar individu dan antar waktu (*random effect*). Variabel dummy di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efesiensi parameter. Penyelesaian dalam masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan yang dikenal dengan metode *random effect*. Estimasi data panel dalam metode ini menjelaskan bahwa variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model yang tepat digunakan untuk mengestimasi *random effect* adalah *Generalized Least Square* (GLS) sebagai estimatornya karena dapat meningkatkan efisiensi dan *least square* (Widarjono, 2013).

3.4.3 Penentuan Metode Estimasi

1) Uji Chow

Uji Chow lebih dikenal dengan uji F-statistik yang merupakan pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *fixed effect*. Memilih model *common effect* atau *model fixed* effect dapat dipahami sama dengan melakukan uji signifikansi *fixed effect*. Uji signifikansi *fixed effect* digunakan untuk memutuskan apakah model dengan asumsi slope dan intersep tetap antar individu dan antar waktu (*common effect*), ataukah diperlukan penambahan variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intersep (*fixed effect*). Hal ini dapat dilakukan dengan uji statistik F. Cara ini dilakukan dengan melihat nilai *residual sum of squares* (RSS) dari kedua model regresi tersebut. Dalam uji ini akan dibandingkan antara hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa *intersep* dan *slope* adalah tetap (model *common effect*) dan hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan bahwa slope adalah tetap sedangkan intersep berubah-ubah atau *fixed effect* (Sriyana, 2014).

Hipotesis dalam uji chow ini sebagai berikut : Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikali dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect* (k) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nol diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect.*

Sehingga hipotesis untuk uji chow sebagai berikut :

H_0 : F hitung < F kritis, H_0 diterima artinya model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM)

H_a : F hitung > F kritis, H_0 ditolak artinya model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

2) Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang dilakukan dalam memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau model *random effect*. Penggunaan model *fixed effect* mengandung suatu unsur *trade-off* yaitu hilangnya derajat bebas yang memasukkan variabel dummy. Tetapi, penggunaan model *random effect* juga harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat.

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-Square* dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nolnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *fixed effect.* Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Square* maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Square* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect*. Sehingga hipotesis untuk uji hausman sebagai berikut :

Ha : *Chi - square* hitung < *Chi - square* tabel, H_0 diterima artinya model yang digunakan adalah *Random Effect* Model (REM)

Ha : *Chi - square hitung* > *Chi - square* tabel, H_0 ditolak artinya model yang digunakan adalah *Fixed Effect* Model (FEM)

3) Uji Lagrange Multiplier

Uji ini menggunakan Breusch-Pagan dilakukan untuk menguji antara model Common Effect dan Random Effect serta untuk mengetahui efek waktu, individu atau keduanya (Rosadi, 2011).

H_0 : Tidak ada *Random Effect* (PLS)

H_a : Ada *Random Effect* (REM)

3.5 Uji Hipotesis

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan dalam analisis ini menggunakan suatu uji terhadap output yang dihasilkan oleh model regresi linear berganda tersebut. Uji statistik ini disebut juga uji signifikan:

3.5.1 Uji t

Menurut Gujarati (2012), uji signifikansi parameter individual (uji t-statistik) melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji signifikansi parameter individual pada tingkat kepercayaan, 95% dengan derajat kebebasan (df = (n-k)).

Kriteria Pengujian:

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika t-hitung > t-tabel ; t-hitung < t-tabel

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika t-hitung < t-tabel ; t-hitung> t-tabel

Dalam penelitian ini, uji t adalah sebagai berikut:

1. PE

   H_0 : $\beta_1 \leq 0$, artinya variabel PE tidak berpengaruh positif terhadap UMP.

   H_a : $\beta_1 > 0$, artinya variabel PE berpengaruh positif terhadap UMP.

2. INFL

   H_0 : $\beta_2 \geq 0$, artinya variabel INFL tidak berpengaruh negatif terhadap UMP.

   H_a : $\beta_2 < 0$, artinya variabel INFL berpengaruh negatif terhadap UMP.

3. CP

   H_0 : $\beta_3 \leq 0$, artinya variabel CP tidak berpengaruh positif terhadap UMP.

   H_a : $\beta_3 > 0$, artinya variabel CP berpengaruh positif terhadap UMP.

3.5.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk memastikan apakah PE, INFL dan CP mampu menaksir Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera, maka dilakukan dengan cara membandingkan F statistik dengan F tabel dengan penggunan ($\alpha = 0,05$).

Kriteria Pengujian:

1. Apabila F statistik > F tabel maka Ha diterima dan H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama PE, INFL dan CP berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Apabila F statistik < F tabel maka H_0 diterima dan Ha ditolak, artinya PE, INFL dan CP secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera.

3.5.3 Koefisien Determinan (R^2)

Nilai R^2 disebut juga koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar presentase variasi variable independen dapat menjelaskan variasi variabel dependennya. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai R^2 mendekati satu variabel independent memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen dalam model tersebut dapat dikatakan baik.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan terhadap analisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Konsumsi Perkapita terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020 dengan analisis regresi data panel menggunakan *random effect model* didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020.
2. Inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020.
3. Konsumsi Perkapita mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020.
4. Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Konsumsi Perkapita secara bersama-sama mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015-2020 sebesar 51,94% .

5.2 SARAN

1. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan tingkat kesejahteraan di suatu wilayah, dimana ketika perekonomian itu tumbuh artinya produktivitas tenaga kerja meningkat sehingga diharapkan perusahaan dapat meningkatkan upah para

tenaga kerja dan dapat memperluas lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak mengalami penurunan.

2. Pemerintah harus memperhatikan tingkat inflasi, Untuk menjaga konsumsi stabil pemerintah dapat membantu dengan cara memberikan subsidi dan dana bantuan kepada masyarakat supaya dapat menurunkan harga barang yang disebabkan oleh bencana yang mengakibatkan inflasi naik karena kekurangan pasokan barang.
3. Konsumsi Perkapita yang tinggi mencerminkan pendapatan perkapita yang tinggi artinya daya beli masyarakat meningkat, hal itu menyebabkan produktivitas perusahaan naik yang diharapkan dapat meningkatkan upah minimum provinsi. Untuk menjaga konsumsi stabil pemerintah dapat membantu dengan cara memberikan subsidi dan dana bantuan sosial kepada masyarakat supaya dapat meningkatkan konsumsi perkapita.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, Karim. 2010. *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers.

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*. Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 4.

Afrizal, F. (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Daerah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011. Skripsi. *Advanced Drug Delivery Reviews*, *135*(January 2006), 989–1011.

Basuki, A. T. dan Imamuddin Yuliadi. 2015. Ekonometrika Teori & Aplikasi‖. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.

Boediono. (2008). *Ekonomi Moneter*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.

Chalid, N. (2010). Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2010. *Jurnal Ekonomi*, *18*(2001), 1–10.

Charysa, Ninda Noviani. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011, Economics Development analysis Journal Vol. 2 No. 4, 2013*. Semarang: Universitas Negersi Semarang.

Dama, H. Y., Lapian, A. L. C., Sumual, J. I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *16*(3), 549–561.

Dornbusch, Rudiger dan Fischer, Stanley. 1997. Makroekonomi Edisi Keempat. Erlangga: Jakarta.

Froyen, Richard T. 2013. *Macroeconomics Theories and Policies*. *Tenth Edition, Global Edition*. *Inggris: Pearson*

Ghozali, Imam. AplikasiAnalisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. *Edisi Enam*. Jakarta: Erlangga.

Gujarati, D.N.2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C . Salemba Empat, buku 2, Edisi 5. Jakarta.

Huda, Nurul. *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.181.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan).

Izzaty. Raika Sari. 2013. Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2. Desember 2013.

James, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Ghalia, 2001).

Kaufman, Bruce. 2000. The Economic of Labor Markets. Fifth Edition. New York: The Dryden Press.

Kertiasih, L. (2017). *19999-29852-1-Sm*. *9*(1), 148–157.

Kistanto, Ilham, (2013), Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Korida, N. U. Y., & Muhsin, M. (2021). Penetapan Upah dan Struktur Skala Upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Antologi Hukum*, *1*(2), 1–17.

Mangeswuri, Dewi Restu. "*DAMPAK PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI 2021 DI TENGAH PANDEMI COVID-19*," Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan StrategisXII, no. 21 (November 2020): 6.

Mankiw, N. G. (2013). Macroeconomics 8th ed - N. Gregory Mankiw.

Merdekawaty, Rahmah. D. I. S., 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR). Jurnal Gaussian, Volume Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

MS, M. Z. (2014). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.3 Tahun 2014 PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI JAMBI M. Zahari MS 1. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14*, *14*(3), 31–37.

Mulyanto, 2005. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: Rajawali.

Nurtiyas, Febrika. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. Skripsi: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Paul, A Samuelson dan Wiliam, dkk, Makroekonomi. Edisi 14. (t.tp:Erlangga,1992), h.257.

Permata Putri, A., & Oliver, J. (2013). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

Inflasi Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Upah Minimum Regional Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Prasetyo, P. Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.

Rosyadi, Dedi. Ekonometrika Dan Analisis Runtun Waktu Terapan. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

Sholeh, M. (2012). Dampak Kenaikan Upah Minimum Propinsi Terhadap Kesempatan Kerja (Studi Kasus Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, *2*(2), 156–167. https://doi.org/10.21831/jep.v2i2.647

Sigit Riyanto, Maria S.W Sumardjono, dkk. (2020). *Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja* . Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Sriyana, Jaka. 2014. Metode Regresi Data Panel. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2003. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat

Sukirno. Sadono. 2013. *Makro Ekonomi Teori,* Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukwiaty, et. all., Ekonomi, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 7

Susanto, Bambang S. 2015. Penyerapan Tenaga Kerja Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Upah Minimum di Indonesia. *The Asia Pacific Journal Of Management*. Volume 1. Nomor 1. Tahun 2014-2015.

Wibowo, A. A., 2018. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990- 2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wibowo, W. dan Fitrantie, M. 2016. *Pemodelan Konsumsi Energi Listrik Pada Sektor Industri di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Metode Regresi Data Panel*. Jurnal Sains dan Seni ITS.

Widarjono, Agus. *2013*. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yustisia, Visti. *Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Depok: Huta Media, 2016), hal. 7

Zaeni Ashyadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 69

https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/Buku_1Sumatera.pdf, diakses tanggal 10 September 2021 pukul 19:13.

https://mjurnal.com/skripsi/uji-asumsi-klasik-untuk-regresi-data-panel/diakses tanggal 8 Agustus 2021 pukul 15.00

https://www.bps.go.id/index.php, diakses tanggal 23 Maret 2021 pukul 15:00

https://ipm.bps.go.id/page/ipm diakses tanggal 8 april 2021 pukul 20:15

https://www.indonesia-investments.com diakses tanggal 10 Juli 2021 pukul 16:45

https://www.kompas.com/ diakses tanggal 10 Juli 2021 pukul 17:05

https://www.republika.id/posts/21843/upah-dan-hidup-layak diakses tanggal 10 Juli 2021 pukul 19:47

https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-upah-minimum diakses tanggal 23 November 2021 pukul 14:03

https://ekonomi.bisnis.com/read/20200409/9/1224864/nilai-bansos-pkh-2020-dinaikkan-ini-rinciannya. diakses tanggal 15 Oktoberber 2022 pukul 17:09